

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sidikalang tahun 2019.

Penyusunan Buku Laporan Tahunan 2019 ini disusun berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1730/SEK/OT.01.2/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan 2019 dan surat dari Pengadilan Tinggi Medan Nomor : W2.U/119/KK.01.10/1/2020 tanggal 9 Januari 2020 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan 2019.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan 2019 ini adalah untuk memberikan gambaran tentang kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang juga sebagai evaluasi apa yang telah dilaksanakan dan menyusun program kerja yang akan dilaksanakan sesuai Tupoksi dimasing- masing bidang, baik bidang Teknis maupun dibidang administrasi umum.

Dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan 2019 ini kami sadari bahwa masih jauh dari sempurna seperti apa yang diharapkan,hal ini dikarenakan terbatasnya waktu, namun demikian harapan kami semoga laporan Tahunan ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penilaian bagi perkembangan Pengadilan Tingkat pertama .

Dibuat di : **Sidikalang**

Pada Tanggal : **Desember 2019**

KETUA

PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

LEDIS MERIANA BAKARA,S.H.,M.H.

NIP. 19760219 200012 2 001

BAB I

P E N D A H U L U A N

Pengadilan Negeri Sidikalang merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, Pengadilan Negeri Sidikalang sebagai Pengadilan tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Medan yang menjadi kawal depan Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat.

Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Sidikalang telah melaksanakan serangkaian kebijakan yang merupakan upaya tindak lanjut dari kebijakan umum yang telah dicanangkan dan diperintahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kebijakan yang diterapkan tahun 2019 tersebut berfokus pada pelayanan publik, dan beberapa kebijakan merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya terutama yang menyangkut tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sidikalang.

Adapun beberapa prioritas kebijakan umum yang telah dilaksanakan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara

Pada tahun 2019 upaya percepatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Sidikalang terus menerus dilakukan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 masih menjadi acuan dalam penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan.

2. Manajemen Perkara

Modernisasi manajemen perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah